



EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (STUDI KASUS PADA SAMSAT WILAYAH JAKARTA UTARA)

Ary Dwiputra

dwiputraary@gmail.com

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Amelia Sandra

Amelia.sandra@kwikkiangie.ac.id

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

ABSTRAK

Pajak daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dikelola oleh Pemerintah daerah. Pemerintah daerah harus lebih efektif dalam menggali sumber-sumber penerimaan daerah. Pajak merupakan salah satu unsur penerimaan yang cukup besar. Perubahan pendapatan dari pajak bisa dikarenakan unsur penambahan peraturan, perbedaan penelitian, adanya teori yang berbeda yang mengakibatkan tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak yang mana dalam hal ini pajak kendaraan. Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai aturan yang berlaku. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang melakukan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah. Objek penelitian ini adalah penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Jakarta Utara. Penelitian yang digunakan penulis adalah studi kasus. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi komunikasi dan observasi. Kemudian akan dilakukan wawancara mengenai tingkat efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor dari tahun 2018 sampai 2020. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor pada tahun 2018 adalah 100,64% yang berarti sangat efektif sedangkan pada tahun 2019 tingkat efektivitas mencapai 97,15% yang berarti cukup efektif dan pada tahun 2020 penerimaan pajak kendaraan stabil tetapi setelah memasuki masa pandemi dari bulan Maret sampai bulan Mei mengalami jumlah penurunan yang sangat drastis karena situasi keuangan yang disebabkan pandemi tersebut sedangkan penerimaan pajak kendaraan bermotor pada bulan Juni sampai Desember mulai mengalami kenaikan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui keefektifitas penerimaan pajak kendaraan bermotor dengan adanya penghapusan denda bagi wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan akan menimbulkan rasa kesadaran untuk melakukan pembayaran pajak yang tertunda dan saran bagi pemerintah daerah agar pembayaran pajak kendaraan bermotor lebih dipermudah dan meringankan beban masyarakat dengan cara penghapusan dari pajak kendaraan.

Kata Kunci : Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor ; Pajak Kendaraan Bermotor.



ABSTRACT

Regional taxes as the main source of regional income are managed by the regional government. Local governments must be more effective in exploring local revenue sources. Tax is one element of revenue that is quite large. Changes in income from taxes can be due to elements of additional regulations, research differences, the existence of different theories that result in the level of community compliance in paying taxes, which in this case is a vehicle tax. Motor vehicle tax is a tax on ownership or control of motorized vehicles. Taxpayer compliance means that the taxpayer has the willingness to fulfill his tax obligations according to the applicable rules. Obedient taxpayers are taxpayers who carry out their tax obligations in accordance with regulations that have been established in accordance with Regional Regulations. The object of this research is the receipt of Motor Vehicle Tax in North Jakarta. The research used by the author is a case study. In this study the authors used data collection techniques through communication and observation studies. Then an interview will be conducted regarding the effectiveness of motor vehicle tax receipts from 2018 to 2020. The results of this study indicate that the effectiveness level of motor vehicle tax revenue in 2018 is 100.64% which means it is very effective while in 2019 the effectiveness level reaches 97.15% which means it is quite effective and in 2020 vehicle tax revenue is stable but after entering a period of the pandemic from March to May experienced a very drastic decline due to the financial situation caused by the pandemic, while motor vehicle tax revenues from June to December began to increase. The conclusion of this study is to determine the effectiveness of motor vehicle tax receipts with the abolition of fines for taxpayers to pay vehicle taxes will create a sense of awareness to make delayed tax payments and suggestions for local governments to make motor vehicle tax payments easier and ease the burden on the community by how to get rid of vehicle tax.

Keywords: Effectiveness of Motor Vehicle Tax Revenue; Vehicle tax

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



I. PENDAHULUAN

Setiap kegiatan yang dilakukan memerlukan biaya. Biaya tersebut dapat dilaksanakan bila adanya pendapatan karena pendapatan merupakan salah satu unsur penting dalam mengatasi biaya. Di setiap negara pasti memerlukan pendapatan yang akan menunjang perkembangan perekonomian baik negara maju maupun berkembang pasti membutuhkan pendapatan. Sumber pendapatan yang biasa diperoleh suatu negara berasal dari pajak daerah. Konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah adalah bahwa setiap daerah dituntut untuk meningkatkan kemandiriannya guna membiayai urusan pemerintahannya sendiri. Pasal 2 UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terdapat 2 (dua) jenis pajak daerah yaitu jenis pajak provinsi dan jenis pajak kabupaten/kota. Jenis pajak provinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP), dan Pajak Rokok. Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu tolak ukur dalam penerimaan pendapatan daerah (Wahyu Aji Wibowo & Irawan Irawan, 2019).

Pajak daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dikelola oleh Pemerintah daerah. Pemerintah daerah harus lebih efektif dalam menggali sumber-sumber penerimaan daerah, agar pembangunan daerah dapat terealisasi dengan sebaik mungkin.

Pajak merupakan salah satu unsur penerimaan yang cukup besar sehingga memerlukan penelitian. Perubahan pendapatan dari pajak bisa dikarenakan unsur penambahan peraturan, perbedaan penelitian, adanya teori yang berbeda yang mengakibatkan tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak yang mana dalam hal ini pajak kendaraan. Dengan dilakukan suatu penelitian diharapkan dapat mengetahui berapa besar pendapatan daerah dari pajak kendaraan bermotor karena pajak kendaraan tersebut merupakan pajak daerah yang diperlukan untuk membiayai kegiatan daerah.

II. KAJIAN PUSTAKA

Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapat balas jasa yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran Negara bagi kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2018:1).

Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor bahwa Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga bergerak kendaraan bermotor yang bersangkutan termasuk alat berat dan alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor yang tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

Wajib Pajak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumbernya.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Pengertian Wajib Pajak menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat (1) adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Gunadi (2017:7) definisi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang UU perpajakan dimaksudkan untuk mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan termasuk membayar pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Gunadi (2017:94) pengertian kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi hukum maupun sanksi administrasi.

Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Rahayu (2017:191) mengatakan bahwa kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada negara. Dengan kesadaran wajib pajak yang tinggi akan memberikan pengaruh yang baik untuk meningkatkan kepatuhan pajak yang lebih baik lagi.

Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan untuk Masa Pajak 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran Kendaraan Bermotor sampai dengan tahun berikutnya pada saat pendaftaran kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor dibayar sekaligus dimuka. Pembayaran dapat dilakukan pada unit pelayanan SAMSAT dan Bank. Untuk pajak kendaraan bermotor yang karena keadaan kahar (*force majeure*) masa pajaknya tidak sampai 12 bulan, dapat dilakukan restitusi atas pajak yang sudah dibayar untuk masa pajak yang belum dilalui.

Efektivitas

Menurut Mukhtar, Ali dan Mardalena (2016: 28) suatu pekerjaan dapat dikatakan efektif apabila pekerjaan tersebut dapat mewujudkan tujuan yang telah ditentukan. Efektivitas tidak hanya memberikan pengaruh atau kesan, akan tetapi berkaitan juga dengan keberhasilan tujuan, penetapan standar, efektivitas, penetapan sasaran, keberadaan program, materi, berkaitan dengan metode atau cara, sarana atau fasilitas dan juga dapat memberikan pengaruh. Dapat disimpulkan bahwa efektivitas lebih melihat kepada hasil akhir atau output sehingga apabila hasil akhirnya tidak sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan maka tidak dapat dikatakan efektif.

Menurut Dotulong, Saerang dan Poputra (2014) efektivitas bertujuan untuk mengukur rasio keberhasilan, semakin besar rasio maka semakin efektif, standar minimal rasio keberhasilan adalah 100% atau 1 (satu) dimana realisasi sama dengan target yang telah ditentukan. Rasio dibawah standar minimal keberhasilan dapat dikatakan tidak efektif. Tingkat efektifitas dapat digolongkan kedalam beberapa kategori yaitu sebagai berikut :

- a. Hasil perbandingan tingkat pencapaian diatas 100 persen berarti sangat efektif.
- b. Hasil perbandingan tingkat pencapaian 100 persen berarti efektif.
- c. Hasil perbandingan tingkat pencapaian dibawah 100 persen berarti tidak efektif.

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Secara



umum, efektivitas menunjukkan sampai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan ataupun target yang terlebih dahulu ditentukan. (Lengkong, Ilat dan Wangkar, 2015).

Kontribusi

Kontribusi adalah suatu iuran, sumbangan, dukungan terhadap suatu kegiatan agar berjalan dengan lancar. (Dewi, Djudi dan Nuzula, 2016) Kontribusi digunakan untuk melihat sejauh mana pajak reklame, pajak hotel dan pajak restoran memberikan sumbangsih dalam penerimaan pendapatan pajak daerah. Untuk mengetahui kontribusi dilakukanlah perbandingan antara penerimaan masing-masing pajak pada periode tertentu dengan penerimaan pajak daerah periode tertentu (Anugrahi, Manossoh dan Tangkuman 2018).

1. Efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor

Pentingnya pembayaran pajak kendaraan bermotor roda dua dan roda empat bagi wajib pajak ini sangat mempengaruhi sikap wajib pajak terhadap sistem perpajakan yang adil. Dengan kualitas pengetahuan yang semakin baik dan memberikan sikap memenuhi kewajiban dengan benar melalui adanya sistem perpajakan suatu negara yang dianggap adil (Kemala, 2015). Pembayaran dalam peraturan perpajakan masyarakat melalui pendidikan formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak karena pembayaran pajak merupakan hal yang paling mendasar harus dimiliki wajib pajak (Yulianawati dan Hardiningsih, 2011). Dengan adanya kesadaran perpajakan tersebut akan membantu kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, sehingga tingkat kepatuhan akan meningkat (Angkoso, 2010). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Susilawati dan Budhiarta (2013) disebutkan bahwa pengetahuan wajib pajak secara parsial berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor.

2. Kontribusi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

Penerimaan pajak kendaraan bermotor di Jakarta Utara memberikan kontribusi yang besar bagi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di DKI Jakarta. Dalam studi kasus ini penulis akan menganalisa kontribusi nilai pajak kendaraan bermotor di Jakarta Utara terhadap nilai Pajak Kendaraan Bermotor di DKI Jakarta selama 3 tahun terakhir.

III. METODE PENELITIAN

Objek Penelitian

Objek Penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Jakarta Utara.

Variabel Penelitian

Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai efektivitas penerimaan pajak, yang dilihat dari nilai target dan nilai realisasi Pajak Kendaraan Bermotor dimana penulis ingin mengetahui tingkat penerimaan pajak di Jakarta Utara pada 3 tahun terakhir dan kontribusi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak.



Teknik Pengumpulan Data

Tujuan pengumpulan data untuk penelitian ini adalah untuk memperoleh data untuk dianalisis. Adapun cara peneliti memperoleh data adalah metode komunikasi dan observasi dengan cara mengamati data target dan realisasi pajak kendaraan bermotor di Jakarta Utara.

Teknik Analisis Data

1. Analisis Efektivitas

Menurut Halim (2008: 234) rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi daerah. Adapun rumus rasio efektivitas adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pajak yang ditetapkan}} \times 100\%$$

Semakin tinggi rasio efektivitas berarti kemampuan daerah semakin baik. Apabila rasio mencapai satu atau seratus persen berarti kemampuan daerah dalam menjalankan tugasnya tergolong efektif.

Kategori efektivitas menurut Mahmudi (2019: 141) adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Kriteria Tingkat Efektivitas

Presentase Efektivitas	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
100 %	Efektif
90% - 99%	Cukup Efektif
75% - 89%	Kurang Efektif
<75%	Tidak Efektif

Sumber : Mahmudi (2019:141)

2. Analisis Kontribusi

Analisis kontribusi merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah, maka dibandingkan antara realisasi penerimaan pajak daerah terhadap PAD dengan menggunakan rumus kontribusi yang merupakan terapan dari rumus derajat kontribusi BUMD dalam Mahmudi (2019: 143) . Rumus yang digunakan untuk menghitung kontribusi adalah sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$



IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Tahun 2018 :

Realisasi	1,471 Triliun
Target	1,462 Triliun

Sumber: <https://wartakota.tribunnews.com/2019/01/06/penerimaan-pajak-kendaraan-di-jakarta-utara-2018-melebihi->

Realisasi	8,55 Triliun
Target	8 Triliun

Sumber: https://jakarta.bpk.go.id/wp-content/uploads/2018/11/Catatan_Berita-Realisasi-Penerimaan-Pajak-DKI-Jakarta-2018.pdf

Berdasarkan hasil penelitian, menurut Robert L. Tobing jumlah target dan realisasi pajak kendaraan bermotor di Jakarta Utara mencapai 1,462 Triliun dan 1,471 Triliun. Jumlah rasio efektivitas adalah 100,64 % yang berarti sangat efektif hal ini diperoleh dengan berbagai macam cara misalnya :

1. Razia kendaraan bermotor secara rutin oleh petugas
2. Penagihan melalui surat-surat yang bersifat himbauan

Kontribusi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Jakarta Utara terhadap kontribusi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di DKI Jakarta pada tahun 2018 adalah 17,2 % yang berarti tidak efektif.

Tahun 2019 :

No	Bulan	Total
1.	Januari	752.092.260.629
2.	Februari	634.931.609.831
3.	Maret	709.897.951.304
4.	April	685.003.958.843
5.	Mei	835.354.067.198
6.	Juni	495.852.508.773
7.	Juli	801.680.752.678
8	Agustus	743.953.647.440
	Grand Total	5.658.766.756.696

Sumber: <https://www.gridoto.com/read/221983598/target-pkb-tahun-2019-rp-88-triliun-tercapai-bprd-dki-jakarta-surplus-puluhan-miliar>

Realisasi	992,5 Triliun
Target	1,55 Triliun

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



Sumber : <https://www.beritasatu.com/megapolitan/574080/dorong-penerimaan-pkb-samsat-jakut-ikut-operasi-ganjilgenap>

Berdasarkan hasil penelitian, jumlah penerimaan pajak kendaraan bermotor per Agustus 2019 adalah 5.658.766.756.696 kemudian target dan realisasi pajak kendaraan bermotor di Jakarta Utara mencapai target 1,55 Triliun dan realisasi 992,5 Triliun. Jumlah rasio efektivitas adalah 640,32 % yang berarti sangat efektif walaupun salah satu cara yang ditempuh adalah dengan penghapusan denda pajak kendaraan.

Tahun 2020 :

NO	BULAN	PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR JAKARTA UTARA	Grand Total
1	Januari	110.319.164.590	702.013.390.265
2	Februari	107.036.256.928	666.653.242.845
3	Maret	94.155.219.441	659.856.207.991
4	April	66.249.132.245	439.971.694.005
5	Mei	70.267.345.843	501.721.291.114
6	Juni	109.488.112.134	753.380.185.615
7	Juli	109.888.366.135	724.546.444.437
8	Agustus	100.870.370.483	653.836.160.578
9	September	112.530.397.490	719.193.218.879
10	Oktober	95.852.538.464	628.892.672.089

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.



11	November	107.199.785.725	727.704.899.334
12	Desember	106.452.435.685	701.454.077.316
Grand Total		1.190.309.125.163	7.879.223.484.468

Sumber : BAPENDA Provinsi DKI Jakarta

Pada tahun 2020 pada bulan Januari dan Februari sebelum pandemi COVID-19 penerimaan pajak kendaraan stabil tetapi setelah memasuki masa pandemi dari bulan Maret sampai bulan Mei mengalami jumlah penurunan yang sangat drastis karena situasi keuangan masyarakat yang disebabkan oleh pandemi tersebut sedangkan penerimaan pajak kendaraan bermotor pada bulan Juni sampai Desember mulai mengalami kenaikan. Hal ini dimungkinkan karena adanya keputusan pemerintah dimana diadakannya penghapusan denda-denda bagi yang belum melunasi pajaknya.

Kontribusi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di DKI Jakarta sebesar 15,10 % yang berarti tidak efektif karena disebabkan masyarakat kurang disiplin pada kepatuhan Wajib Pajak dan pendapatan daerah di masa pandemi sedikit menurun.

Pembahasan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, Tingkat efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Jakarta Utara dimasa sebelum pandemi pada tahun 2018 penerimaan dapat mencapai 100,64 % yang berarti sangat efektif.

Pada tahun 2019 jumlah penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor per Agustus 2019 adalah 5.658.766.756.696 dan rasio efektivitas penerimaan yang ditentukan pemerintah dalam hal pendapatan pajak kendaraan bermotor tahun 2019 sebesar 640,32 % yang berarti sangat efektif.

Memasuki tahun 2020 dimana telah terjadi masa pandemi berdasarkan tabel diatas penerimaan pajak kendaraan bermotor mengalami naik-turun. Hal ini dikarenakan pada awalnya perekonomian masih membaik dan setelah pandemi perekonomian sudah berkurang dimana pendapatan masyarakat pun berkurang sehingga mempengaruhi keinginan untuk membayar pajak kendaraan. Kenaikan yang dapat kita lihat dikarenakan ada beberapa hal yang pemerintah lakukan agar tetap dapat menerima pajak kendaraan bermotor yang merupakan pendapatan daerah dengan cara menghapuskan denda, mengadakan razia secara rutin dan memberikan surat himbauan kepada masyarakat agar masyarakat sadar tidak terbebani oleh besarnya pajak yang harus dibayarnya.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Setelah melakukan penelitian dan analisis efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor, maka dapat disimpulkan tingkat efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor tahun 2018 dan tahun 2019 sangat efektif sedangkan tingkat efektivitas dan kontribusi tahun 2020 tidak efektif.

Berdasarkan simpulan dan hasil penelitian yang telah dilakukan, saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan tingkat efektivitas. Pertama bagi pemerintah daerah Agar pembayaran pajak kendaraan bermotor lebih dipermudah dan meringankan beban masyarakat dengan cara

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

penghapusan atau pemutihan dari pajak kendaraan yang belum di bayar oleh masyarakat karena dimasa pandemi pendapatan masyarakat pun berkurang sehingga masyarakat tidak memikirkan pajak kendaraan tetapi juga keperluan lainnya. Kedua bagi peneliti selanjutnya peneliti juga menyarankan agar dibuatkan suatu keputusan lagi yang lebih baik dan tidak memberatkan masyarakat.

Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





DAFTAR PUSTAKA

Dotulong, G. A. G., Saerang, D. P. E., & Poputra, A. T. (2014), Analisis Potensi Penerimaan dan Efektivitas Pajak Restoran di Kabupaten Minahasa Utara, vol.14, no.2, Universitas Sam Ratulangi, diakses 17 Mei 2019, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/4188>

Halim, Abdul (2008), Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi 3, Jakarta: Salemba Empat.
<https://bprd.jakarta.go.id/pajak-kendaraan-bermotor/>, diakses 7 Februari 2022

https://dpp.jakarta.go.id/wp-content/uploads/downloads/2017/01/Pergub-185-Tahun-2016-tentang-Petunjuk-Pelaksanaan-Pemungutan-Pajak-Kendaraan-Bermotor_.pdf, diakses 7 Februari 2022

https://jakarta.bpk.go.id/wp-content/uploads/2018/11/Catatan_Berita-Realisasi-Penerimaan-Pajak-DKI-Jakarta-2018.pdf, diakses 6 Februari 2022

<https://megapolitan.kompas.com/read/2019/01/04/12132341/tahun-2018-realisasi-penerimaan-pajak-samsat-jakbar-10164-persen>, diakses 6 Februari 2022

<https://otomotifnet.gridoto.com/read/233044064/buruan-bayar-pajak-kendaraan-di-dki-jakarta-lagi-murah-sampai-akhir-2021>, diakses 6 Februari 2022

<https://wartakota.tribunnews.com/2019/01/06/penerimaan-pajak-kendaraan-di-jakarta-utara-2018-melebihi->, diakses 6 Februari 2022

<https://www.beritasatu.com/megapolitan/574080/dorong-penerimaan-pkb-samsat-jakut-ikut-operasi-ganjilgenap>

<https://www.gridoto.com/read/221983598/target-pkb-tahun-2019-rp-88-triliun-tercapai-bprd-dki-jakarta-surplus-puluhan-miliar>, diakses 6 Februari 2022

<https://www.republika.co.id/berita/r495s1484/capaian-pajak-daerah-di-jakarta-timur-sekitar-8630-persen>, diakses 6 Februari 2022

Gusti Ayu Mas Rosita Dewi dan Kadek Wulandari Laksmi P (2019). Efektivitas E-SAMSAT, Pajak Progresif dan Kualitas Layanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Lengkon, Triski I.M, Ventje Ilat, dan Anneke Wangkar (2015), Analisis Potensi Dan Efektivitas Pemungutan Pajak Reklame Di Kota Bitung, vol. 15 no. 04, Universitas Sam Ratulangi Manado.

Mahmudi (2019), Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Edisi 4, Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*, Edisi Terbaru 2018, Yogyakarta: Andi.

Mariana, Lina dan Altin, Muhammad (2019). Efektivitas Penerimaan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Roda Empat Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Martadani, Pungky Dwi dan Hertati, Diana (2019). Efektivitas Pelaksanaan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Pada Unit Pelaksanaan Teknis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur di Jombang

Mokoginta, Nani Chairini (2015). Analisis Efektivitas Prosedur Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dalam Peningkatan PAD Provinsi Sulawesi Utara

Mukhtar, Hapzi Ali dan Mardalena (2016), Efektivitas Pimpinan: Kepemimpinan Transformatif dan Komitmen Organisasi, Yogyakarta: Deepublish.

Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2010, tentang Ketentuan Umum Pajak daerah.

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010, tentang Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015.

Peraturan Gubernur Nomor 168 Tahun 2012, mengenai Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor.

Peraturan Gubernur Nomor 89 Tahun 2019, tentang Pemberian Keringanan Pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) atas Kepemilikan Kendaraan Bermotor Kedua dan Seterusnya Tahun 2019.

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010, tentang Pajak Kendaraan Bermotor.

Peraturan Gubernur Nomor 185 Tahun 2016, tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor.

Republik Indonesia. 2007. Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Resmi, Siti. (2019). *Perpajakan*, Edisi – ke 11, Jakarta: Salemba Empat.

Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Wibowo, Wahyu Aji, Irawan dan Arry Harmoko (2019). Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada SAMSAT pembantu wilayah Bagelen)

Ucapan Terima Kasih

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik dan tepat waktu. Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi di Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa segala sesuatu tidak terlepas dari doa, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan tulus penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Hanif Ismail selaku ketua program studi akuntansi dan dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengajaran kepada penulis.
2. Ibu Amelia Sandra, S.E., AK., M.Si, M.Ak. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan dengan sabar memberikan bimbingan dan pengarahan dalam proses penulisan skripsi ini.
3. Seluruh dosen Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie yang telah mengajar peneliti dan mempunyai semangat yang sangat besar bagi penulis dalam menyelesaikan penelitian program studi akuntansi.
4. Seluruh Keluarga penulis yang selalu memberikan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini, mendoakan, serta mendukung hingga selesainya skripsi ini.
5. Seluruh Teman-teman UKM Keluarga Mahasiswa Katolik (KMK) yang sudah memberikan motivasi dan semangat dalam proses penulisan skripsi ini.
6. Teman-teman kelas khususnya Joshua Kairupan, RJ, Pipo, Aang, Sugab, Elroy, Richie, David dan Tammy yang sudah memberikan dukungan dalam proses penyusunan skripsi ini.
7. Teman-teman yang lainnya seperti Sharon Bell, Matriyani dan Bella Marsella.
8. Semua pihak yang selalu membantu penulis selama melaksanakan penelitian dan penyusunan skripsi yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan dalam skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak.



Lampiran

Data Pajak Kendaraan Bermotor DKI Jakarta

1. Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2018 di Jakarta Utara

Target	1,462 Triliun
Realisasi	1,471 Triliun

2. Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2018 DKI Jakarta

Realisasi	8,55 Triliun
Target	8 Triliun

2. Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2019 di Jakarta Utara

Target	1,55 Triliun
Realisasi	992,5 Triliun

No	Bulan	Total
1.	Januari	752.092.260.629
2.	Februari	634.931.609.831
3.	Maret	709.897.951.304
4.	April	685.003.958.843
5.	Mei	835.354.067.198
6.	Juni	495.852.508.773
7.	Juli	801.680.752.678
8	Agustus	743.953.647.440
	Grand Total	5.658.766.756.696

3. Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2020 di DKI Jakarta

NO	BULAN	PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR JAKARTA UTARA	Grand Total
1	Januari	110.319.164.590	702.013.390.265

Hak Cipta Milik IBI IKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2	Februari	107.036.256.928	666.653.242.845
1	Maret	94.155.219.441	659.856.207.991
4	April	66.249.132.245	439.971.694.005
3	Mei	70.267.345.843	501.721.291.114
5	Juni	109.488.112.134	753.380.185.615
6	Juli	109.888.366.135	724.546.444.437
8	Agustus	100.870.370.483	653.836.160.578
9	September	112.530.397.490	719.193.218.879
10	Oktober	95.852.538.464	628.892.672.089
11	November	107.199.785.725	727.704.899.334
12	Desember	106.452.435.685	701.454.077.316
	Grand Total	1.190.309.125.163	7.879.223.484.468

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Ditanggung Undang-Undang

1. Dilarang menjiptip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.